

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan kegiatan PKL di Apotek Nimas Farma dapat disimpulkan bahwa standar pelayanan kefarmasian di Apotek Nimas Farma sudah sesuai. Standar pelayanan Haryono Nimas Farma meliputi identifikasi resep, peracikan obat, labeling dan pemberian informasi obat kepada pasien sudah berjalan sesuai ketentuan.

Pelayanan informasi obat kepada pasien di Apotek Nimas Farma sudah sesuai, seperti cara pemakaian obat, efek samping dan informasi yang perlu disampaikan oleh seorang apoteker atau asisten apoteker.

#### **B. SARAN**

1. Sebelum praktek, mahasiswa harus sudah siap untuk PKL di apotek atau menguasai bahan-bahan untuk PKL.
2. Perlu dilengkapi untuk stok/persediaan obat dan alkes di Apotek Nimas Farma.
3. Kurangnya ruangan penyimpanan obat yang luas agar obat dapat tertata dengan rapi.
4. Kurangnya tenaga medis ( Asisten Apoteker)

## DAFTAR PUSTAKA

- UU RI. 2009. *Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, Indonesia
- UU RI. 2009. *Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Sekretariat Negara RI
- UU RI. 2014. *Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*, Indonesia
- Permenkes RI. 2015. *Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi*, Jakarta : Depkes RI.
- Permenkes RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta ; Depkes RI.
- Kepmenkes RI. 2002. *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri RI Nomor 922/Menkes/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek*. Indonesia
- Peraturan Pemerintah RI. 2009. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Indonesia
- Umar, Muhammad. (2011). *Manajemen Apotek Praktis* cetakan keempat. Jakarta: Wira Putra Kencana.
- Anief, M. 1998. *Managemen Farmasi*. Jogjakarta, Gajah Mada University Press
- Peraturan Pemerintah RI. 2017. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*. Indonesia

Permenkes. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*